

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Orientasi Politik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan orientasi adalah kecenderungan akan satu arah tertentu, atau keinginan kedepan yang hendak dicapai, sedangkan pengertian politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tata negara dan ilmu tentang kekuasaan. Akan tetapi dalam lingkup yang lebih khusus politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Atas pengertian tersebut maka orientasi politik dapat diartikan sebagai sebuah keinginan yang hendak dicapai melalui suatu pilihan politik yang menjadi bagian dari sistem politik Indonesia (www.globalisasi.wordpress.com, diakses pada tanggal 19 April 2015).

Orientasi politik merupakan pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Orientasi politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Orientasi politik merupakan

perilaku dalam individu, sedangkan perilaku luarnya adalah berupa kegiatan, hal ini perlu ditegaskan karena Orientasi individu tidak selalu *termanifestasikan* dalam perilakunya, orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik (Surbakti, 2010: 141).

Orientasi politik memiliki makna yang sangat luas meliputi, melihat, mengenal, pandangan, pendapat, sikap penilaian, pengetahuan, dan keyakinan. Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki, dengan orientasi itu pula mereka menilai serta memertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik (Said dan Said, 2007: 237).

Membicarakan orientasi politik tentunya tidak akan terlepas dari dua pembicaraan, yakni orientasi yang berdasarkan kemakmuran rakyat banyak dan orientasi kekuasaan yang dimiliki elit politik. Elit politik yang hanya mengandalkan kekuasaan kinerjanya hanya berdasarkan perolehan kekuasaan dan pengakuan setinggi-tingginya, elit politik yang biasa memanfaatkan

kekuasaannya adalah elite yang memunyai modal atau bisnis yang dapat memengaruhi kehidupan bernegara (Damsar, 2012:78).

Budaya demokrasi dalam suatu negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila pemegang kekuasaan atau elit politik tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hal penting lain yang harus diingat adalah bahwa demokrasi bukan hanya sekedar tata cara, prosedur, dan bukan juga sekedar mekanisme tata negara dalam pengelolaan sistem politik, melainkan isi, tingkah laku, komunikasi, interaksi, serta tata nilai (www.kompasiana.com, politik, diakses pada tanggal 19 April 2015).

Almond dan Verba merumuskan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, dalam budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut :

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya;

b. Komponen afektif

Komponen afektif adalah perasaan terhadap sistem politik atau peranannya, para aktor dan penampilannya;

c. Komponen evaluatif

Komponen evaluatif adalah penilaian dan opini tentang objek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai standar terhadap objek politik dan kejadian-kejadian.

Ketiga komponen di atas tidak terpisah untuk dapat membentuk suatu penilaian terhadap suatu objek politik seseorang tentunya harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang objek tersebut, akan tetapi pengetahuan ini tentulah sudah dipengaruhi, diwarnai, dibentuk oleh perasaan sendiri. Sebaliknya, pengetahuan tentang objek politik dapat pula membentuk atau mewarnai perasaan-perasaan seseorang terhadap objek politik itu (Sastroatmodjo, 1995: 37).

Almond dan Verba (1984:18) menggolongkan dimensi-dimensi orientasi politik menjadi beberapa objek politik, yaitu :

1. Sistem sebagai objek umum, memberikan pengertian pada sistem sebagai suatu keseluruhan termasuk berbagai perasaan tertentu seperti patriotisme, alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa serta pengertian dan evaluasi terhadap pemerintahan;
2. Objek-objek input, meliputi struktur-struktur yang terlibat intens dalam proses input, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, dan media komunikasi, serta menunjukkan pada arus tuntutan dan proses konversi tuntutan-tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintahan dan proses konversi tuntutan-tuntutan itu menuju kebijakan otoritatif;
3. Objek-objek output, mengacu pada proses dengan mana kebijakan itu diterapkan atau diperkuat, struktur yang terlibat aktif adalah birokrasi dan lembaga peradilan;
4. Pribadi-pribadi sebagai objek, menyangkut isi dan kualitas kemampuan diri setiap orang sebagai aktor politik, serta norma-norma kewajiban politik seseorang dalam sistem politik.

Almond dan Verba (1984:48) mengklasifikasikan budaya politik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Budaya politik parokial

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki penghususan tugas tetapi peran yang satu dilakukan dengan peran yang lain, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

2. Budaya politik subjek

Budaya politik subjek masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, keputusan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang, bagi mereka, yang prinsip adalah mematuhi, menerima, setia, dan loyal kepada pemimpin.

3. Budaya politik partisipan

Masyarakat dalam budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan untuk sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses dan administratif.

Orientasi politik merupakan sebuah bentuk dari perilaku politik karena di dalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, dan pilihan politik. Perilaku politik adalah suatu interaksi antara pemerintah dan rakyat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik (Surbakti, 2010: 15).

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat, timbulnya orientasi politik dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola untuk memandang suatu objek politik, orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut memengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang.

B. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Agama merupakan sumber kekuatan rohani sekaligus sumber kesadaran akan makna, hakikat, dan tujuan hidup manusia, PPP selalu berusaha untuk memerjuangkan keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak lepas dari syariah Islam, PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar politik sehingga PPP bermaksud untuk mewujudkan pembangunan demokrasi politik karena hal tersebut berkaitan dengan penentuan kebijakan pembangunan nasional yang menyangkut hidup orang banyak (Kamarudin, 2003: 68).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu memersatukan berbagai fraksi dan kelompok dalam Islam. Hal tersebut wajar jika PPP memroklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. PPP berasaskan Islam dan

berlambangkan Ka'bah tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan orde baru PPP pernah menanggalkan Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila dengan sistem politik dan peraturan perundangan yang berlaku sejak 1984.

Tujuan PPP yang tercantum dalam pasal 5 AD/ART Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibawah ridha Allah *Subhanahu Wata'ala*. PPP memunyai pengertian sebagai Rumah Besar Umat Islam, *pertama* PPP merupakan tempat kembalinya Orang Islam. *Kedua* PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang merupakan partai yang paling gigih memerjuangkan aspirasi umat Islam dari berbagai kalangan yang merugikan umat Islam di Indonesia. *Ketiga*, PPP merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi umat Islam dan melakukan tindak lanjut, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (www.wikipedia.org, sejarah Partai Persatuan Pembangunan, diakses pada tanggal 18 Maret 2015).

C. Tinjauan Tentang Partai Politik

Kekuasaan suatu negara, baik yang *konservatif* maupun yang *revolusioner* dan yang didukung oleh elit politik maupun oleh massa, baik pemerintahan yang menganut sistem demokratis *pluralis* maupun yang menganut sistem demokrasi *diktatoris*, pada umumnya partai politik dianggap sebagai alat atau kendaraan dari suatu sistem yang sudah berkembang.

Partai politik dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok anggota untuk mencapai tujuan tertentu dan bersifat nasional yang terbuka bagi semua orang untuk ikut serta menjadi anggota partai politik dengan tetap berpegang teguh pada empat pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik sebagai sarana untuk melaksanakan pemilihan umum yang digunakan sebagai alat untuk melancarkan dalam memperoleh jabatan maupun kekuasaan dalam pemerintahan yang memunyai anggota secara sukarela bersatu dan ikut serta dalam berbagai pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan motivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari serta memertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun (Surbakti, 2010: 148).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memerjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Handoyo mendefinisikan partai politik sebagai organisasi politik yang memberikan jalan bagi anggota atau kadernya untuk berkompetisi memperoleh suara rakyat guna mengisi jabatan-jabatan politik, secara publik, maupun administratif dapat berasal dari kalangan partai yang berkomitmen terhadap partai atau setidaknya yang dapat menguntungkan masa depan partai. Partai politik sebagai sarana untuk memberikan tempat bagi para anggota atau masyarakat untuk bersaing dalam memperoleh dukungan dari masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam kegiatan politik yang ada di pemerintahan ataupun untuk mengisi jabatan publik dalam pemerintahan yang berlangsung (Munandar dan Susanti, 2010: 145).

Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi dan setiap anggota-anggotanya memiliki orientasi dan kemampuan masing-masing, serta memunyai tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau memertahankan kekuasaan yang telah dimiliki seseorang yang dilakukan secara berkesinambungan dan melalui berbagai cara secara konstitusional atau melalui pemilihan umum dengan memperoleh dukungan rakyat untuk menjadi wakil rakyat dengan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Partai politik merupakan salah satu sarana partisipasi politik, sebagai sarana perantara antara konstituennya dengan pemerintah maka peran dari partai politik adalah signifikan. Adanya partai politik dapat memberikan sarana kepada individu untuk aktif dalam aktivitas-aktivitas dan kegiatan politik

sehingga individu maupun masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan komunikasi langsung dengan pemerintah (Kamarudin, 2003: 96).

Fungsi partai politik sangat banyak dan hampir dilaksanakan sesuai dengan porsi dari masing-masing partai politik, partai politik ada yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pengendali konflik, agregasi dan artikulasi kepentingan serta sebagai sarana pendidikan politik. partai politik sebagai sarana pendidikan politik apabila yang dilakukan suatu partai politik biasanya sangat subjektif, dalam hal ini partai politik tertentu menginginkan simpatisannya tetap berada di pihaknya, bahkan orang yang tidak simpati diharapkan bersimpati kepada partai politik tersebut, meskipun sangat subjektif pendidikan politik yang dilakukan partai politik masih amat diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesadaran politik masyarakat (Munandar dan Susanti, 2005: 151).

Menurut Budiharjo (2008: 405-407), fungsi partai politik di negara demokrasi seperti di Indonesia terbagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik merupakan perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah adalah bertindak sebagai alat pendengar sedangkan bagi warga masyarakat sebagai alat pengeras suara. Proses komunikasi politik dapat digunakan untuk memengaruhi bahkan mengubah suara kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partai politik menjalankan fungsinya sebagai komunikasi adalah secara sengaja atau tidak sengaja akan menghasilkan informasi yang berasal dari pemerintah kepada warga masyarakat secara luas dan ada usaha untuk memberikan pengaruh ataupun reaksi terhadap pihak yang di beri informasi sehingga kegiatan informasi antara kedua belah pihak dapat tersampaikan secara jelas dan nyata yang dapat dilakukan lisan, tertulis ataupun menggunakan isyarat.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisasi politik dalam kajian ilmu politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang akan memperoleh Orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku dalam masyarakat, hal tersebut akan menentukan persepsi dan reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik yang terjadi. Proses sosialisasi politik terjadi seumur hidup terutama pada masa kanak-kanak yang berkembang melalui keluarga, sekolah, partai politik maupun pengalaman sebagai orang dewasa dalam memberikan atau menyosialisasikan nilai-nilai politik yang dilakukan melalui berbagai cara agar tepat pada sasaran, misalnya menggunakan media massa, ceramah kursus kader dan lain-lain. Fungsi sosialisasi politik paling tinggi adalah partai politik dapat mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingannya sendiri di bawah kepentingan nasional. Fungsi sosialisasi politik dapat dikaitkan dengan pendidikan politik secara ketat dengan usahanya yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh generasi satu ke generasi berikutnya.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik
Fungsi rekrutmen politik berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas dan mampu mengembangkan partai serta pribadinya secara substansional untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam tingkat nasional. Proses rekrutmen politik akan menjamin eksistensi partai politik, dikarenakan partai politik dapat memperbanyak anggota yang mendorong partisipasi secara luas dan menjamin kelangsungan kepemimpinan partai politik. Rekrutmen politik dilakukan partai politik kapan saja, paling substansial saat menjelang pemilihan umum.
4. Sebagai sarana pengatur konflik (*Conflict Management*)
Perbedaan pendapat, kesalahpahaman diantara anggota sangat rentan menimbulkan dan berpotensi menjadi konflik, peran partai politik pada situasi ini sangat diperlukan karena partai politik dapat menjadi penghubung ataupun konsolidasi diantara para anggota ataupun masyarakat dengan pemerintah sehingga manajemen konflik dapat dilaksanakan mengingat kehidupan masyarakat yang heterogen. Adanya partai politik yang fungsinya sebagai manajemen konflik akan memberikan jembatan penghubung atau perantara antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga pertentangan-pertentangan yang terjadi dapat teratasi, selain fungsi yang positif terkadang partai politik dalam manajemen konflik dapat pula memunyai fungsi negatif karena partai politik biasanya menjadi memertajam pertentangan-pertentangan yang terjadi hingga membahayakan stabilitas nasional.

Menurut Surbakti (2010: 117-118), terdapat beberapa fungsi partai politik yang sering dikaji dan diamati, di antaranya adalah :

1. Sosialisasi politik, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai pembentuk Orientasi politik para anggota atau kelompok masyarakat, kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan cara mendidik masyarakat agar memahami politik baik dengan pendidikan formal maupun non formal agar masyarakat mempunyai kesadaran politik berdasarkan ideologi partai yang dipilih;
2. Komunikasi politik, adalah proses pemberitahuan tentang politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah agar sama-sama saling mengetahui, sehingga dalam konteks ini partai politik menjadi komunikator;
3. Rekrutmen politik, fungsi ini berarti partai melaksanakan rekrutmen baik dalam rangka mendudukkan kader kedalam parlemen yang menjalankan legislasi dan koreksi maupun lembaga-lembaga pemerintahan;
4. Partisipasi politik, fungsi ini adalah kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan atau penentuan kebijakan serta ikut dalam penentuan pemimpin negara dan kegiatan tersebut dapat berupa tuntutan, kritik, menentang serta mendukung suatu kebijakan;
5. Pemandu kepentingan, partai sebagai pemandu dan penampung dari kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda melalui analisis dan perbedaan kepentingan tersebut menjadikan jalan alternatif guna kebijakan umum kemudian diperjuangkan dalam proses pelaksanaan keputusan politik;
6. Pengendalian konflik, partai sebagai sebuah pengendalian konflik dengan cara menampung dan memandukan dari kedua belah pihak, berdialog dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, kemudian menampung dan memandukan serta berdialog dengan pelaku konflik, lalu permasalahan tersebut diproses dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk menentukan atau menghasilkan keputusan politik;
7. Kontrol politik, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai pengontrol pemerintahan bilamana suatu saat pemerintah melakukan kesalahan serta penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan menurut Rahman (2007:104). fungsi partai politik antara lain adalah :

1. Agregasi kepentingan, yaitu berfungsi sebagai pemandu atau pembanding aspirasi masyarakat serta dirumuskan sebagai bahan untuk program kepentingan politik;
2. Sosialisasi politik, yaitu berfungsi sebagai cara melalui nama seseorang memperoleh Orientasi terhadap perkembangan politik yang terjadi dimasyarakat;

3. Partisipasi politik, yaitu berfungsi sebagai pendorong agar masyarakat ikut aktif dalam kegiatan politik dan menggunakan ideologi, platform, serta visi dan misi partai;
4. Komunikasi politik, yaitu berfungsi sebagai penyalur pendapat dan aspirasi masyarakat;
5. Pembuat kebijakan, yaitu berfungsi sebagai pengontrol dan pembuat kebijakan partai yang sedang berkuasa.

D. Tinjauan Tentang Konflik

Kalimat konflik sering muncul di setiap penjuru, baik internal maupun eksternal, baik yang bersifat nasional maupun internasional, konflik juga dapat mengakibatkan kerusuhan dan kehancuran, sebab konflik dapat terjadi karena terdapat faktor dan sebab pertentangan atau permasalahan antara dua kelompok atau antara orang-perorangan.

Pada umumnya, konsep konflik didefinisikan sebagai bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih sehingga semuanya sama-sama saling memerjuangkan argumennya sampai meyakini bahwa dia atau kelompok tersebut adalah yang benar, dan bahkan pertentangan yang tadinya bersifat non fisik dapat berubah menjadi pertentangan fisik atau kekerasan. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang dapat berlaku dalam berbagai keadaan, akibat daripada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara terus menerus (www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 18 Maret 2015).

Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara

individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan (Subekti, 2010: 75).

Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat hubungan antar anggotanya (Bartens dan Nugroho, 1985: 211).

Menurut Soerjono Soekanto (1995: 68), konflik adalah proses sosialisasi dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan, hal itu karena konflik atau perbedaan baik pendapat, aspirasi, maupun ide dapat memeperkaya gagasan yang berlainan dan bervariasi merupakan sumber inovasi, perubahan dan kemajuan, apabila perbedaan itu dapat dikelola melalui mekanisme yang baik. Konflik dapat berfungsi sebagai sumber perubahan ke arah kemajuan, konflik memunyai fungsi sebagai pengintegrasikan masyarakat dan sumber perubahan (Surbakti, 2010: 76).

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik, hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing memunyai *interest*, tujuan yang mungkin saling bertentangan, maka konflik dalam ilmu politik sering diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang (Arifin, 2002: 184).

Menurut Duvenger dalam Sanit (1982: 47) terdapat tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik, antara lain yaitu :

1. Konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar yang prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan masalah ideologis yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok;
2. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik;
3. Konflik yang lebih menitikberatkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memerjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

Menurut Coser (2009: 54), terdapat dua bentuk dasar konflik, yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik adalah konflik yang memunyai sumber konkrit atau material, seperti perebutan wilayah atau

kekuasaan, konflik ini bisa di atasi kalau diperoleh dengan cara merebut tanpa perkelahian atau pertikaian. Konflik non ralistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik agama, dan organisasi-organisasi masyarakat.

Maswadi Rauf (2001: 49) mengemukakan bahwa, konflik terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memerebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas, sama halnya dengan sumber-sumber posisi atau kedudukan atau jabatan dalam masyarakat, kedudukan sebagai penguasa negara, merupakan bahan rebutan diantara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik.

Menurut Duverger (2001: 41), penyebab terjadinya konflik adalah:

1. Sebab-sebab individual, sebab-sebab individual seperti kecendrungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada.
2. Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok, penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

E. Kerangka Pikir

Self efficacy dapat didefinisikan sebagai penilaian mengenai seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. Penilaian ini berpengaruh kuat terhadap pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan serta emosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep *self efficacy* merupakan elemen penting dari teori sosial kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajar mengalami proses belajar secara langsung

Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Orientasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara pandang yang dilakukan oleh pengurus DPW PPP Lampung terhadap konflik PPP di tingkat pusat.

Berkaitan dengan konflik internal yang terjadi dalam kepengurusan PPP di tingkat pusat telah mengakibatkan perpecahan antara dua kelompok kepemimpinan, atas hal tersebut maka setiap DPW PPP di berbagai daerah khususnya DPW PPP Lampung dituntut untuk dapat menentukan suatu orientasi politik berkaitan dengan permasalahan internal partai yang sampai saat ini masih terjadi.

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :

